



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 06 Juli 2018

Halaman: 13

Satpol PP Gencarkan Patroli Prostitusi

Kegiatan patroli lingkungan juga dilakukan untuk menindak pelanggaran lain.

YOGYAKARTA — Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta kembali mengencarkan kegiatan patroli lingkungan di Kampung Mrican Umbulharjo untuk menekan potensi pelanggaran terutama yang selama ini menjadi keluhan warga, yaitu prostitusi.

"Jika sebelumnya kami melakukan patroli secara umum digabung dengan patroli ke wilayah-wilayah lain, maka sekarang ini kami prioritaskan di Kampung Mrican saja. Sudah dimulai sejak Rabu (4/7) malam," kata Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta Nurwidi Hartana di Yogyakarta, Kamis (5/7).

Menurut dia, kegiatan patroli lebih diutamakan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang kondusif bagi warga sehingga fokus patroli dilakukan di fasilitas dan area publik.

Nurwidi mengatakan, kegiatan patroli lingkungan tidak hanya difokuskan pada prostitusi saja tetapi juga terhadap pelanggaran lain. "Jika ditemukan pelanggaran peraturan daerah, maka akan kami tindak," katanya.

Kegiatan patroli di Kampung Mrican tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut dari tuntutan warga Kampung Mrican terhadap Janji Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membersihkan kampung tersebut dari prostitusi tiga bulan sebelum puasa.

Kampung Mrican pernah dijadikan sebagai lokasi lokalisasi sejak 1973 hingga 1997. Meskipun lokalisasi sudah ditutup, namun citra kampung yang dianggap negatif masih terus melekat. "Untuk titik-titik yang diduga digunakan sebagai prostitusi, sudah kami kantongi. Namun, kami harus hati-hati dalam mengambil tindakan, jangan sampai salah," katanya.

Satpol PP Kota Yogyakarta menyiapkan dua dasar hukum untuk penertiban yaitu Perda Pelacuran dan Perda Pondokan. Camat Kecamatan Umbulharjo Marjuki mengatakan, sudah memetakan lokasi yang diragukan sebagai tempat prostitusi. "Ada di tiga titik rumah atau pondokan. Sebenarnya, ini yang menjadi keluhan utama masyarakat di Kampung Mrican. Namun, mereka biasanya kucing-kucingan saat penertiban," katanya.

Kecamatan Umbulharjo, lanjut dia, sudah berupaya melakukan sosialisasi tentang aturan pondokan, dan diketahui tiga titik pondokan tersebut belum mengantongi izin. Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menyatakan akan segera melakukan tindakan kongkrit terkait pelanggaran ketertiban di Kampung Mrican, salah satunya dengan optimalisasi peran Satpol PP.

"Instansi lain juga harus memberikan perhatian lebih ke Mrican, salah satunya mengubah stigma negatif kampung dari wilayah 'remang-re-mang' menjadi daerah yang lebih baik dan bisa dihinggakan," katanya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk mengubah citra negatif kampung adalah dengan deklarasi Kampung Takwa.

Sebelumnya, puluhan warga Kampung Mrican Kelurahan Giwangan Yogyakarta datang ke Balai Kota Yogyakarta untuk menagih janji pemerintah daerah setempat membersihkan prostitusi dari kampung tersebut.

Pemerintah melalui Bapak Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti pernah berjanji bahwa tiga bulan sebelum puasa kampung bebas prostitusi. Tetapi, janji tersebut belum juga terwujud sampai sekarang," kata Ketua RW 8 Mrican Harsono yang mewakili warga Mrican saat audiensi di Balai Kota Yogyakarta.

Menurut dia, Pemerintah Kota Yogyakarta kurang mendukung keinginan warga untuk membebaskan Kampung Mrican dari segala bentuk prostitusi agar kampung tersebut tidak lagi memiliki citra negatif.

Wedi Feriati Rahadi

Instansi	Tindak Lanjut
1. Satpol PP	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2. Kec. Umbulharjo	<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3. Kel. Giwangan	<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4. Din. Sosial	
5.	

Netral
 Segera
 Untuk diketahui

Yogyakarta,
 Plt. Kepala Sekretaris
 Ttd
Ig. Trihastono, S.Sos, MM
 NIP. 19690723 199603 1 005

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Kecamatan/Kemantren Umbulharjo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kelurahan Giwangan			
3. Sat Pol PP			
4. Dinas Sosial			

Yogyakarta, 17 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005